

**Judul** : ABU-ABU PELUNCURAN BURSA KRIPTO DI INDONESIA  
**Tanggal** : Sabtu, 02 April 2022  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 14

Sabtu, 2 April 2022

## SPOTLIGHT

# 14

Bisnis Indonesia

| ASET KRIPTO |

### ABU-ABU PELUNCURAN BURSA KRIPTO DI INDONESIA

Peluncuran bursa aset kripto (cryptocurrency) di Indonesia belum dapat dipastikan waktu pelaksanaannya, meskipun Bappebti selaku regulator mengklaim tidak ada kendala yang menghalangi.

Yustinus Antri & Myman Ary Widyad  
medialab@su.com

**P**erhatian para investor dan pedagang (exchanger) aset kripto (cryptocurrency) di Indonesia untuk menjajal bursa komoditas tersebut, tampaknya harus menunggu hingga waktu yang belum dapat ditentukan.

Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sempat mengupayakan agar peluncuran bursa kripto dapat dilakukan pada akhir 2021. Namun, upaya itu belum dapat dilakukan, sehingga diperkirakan bursa tersebut meluncur pada kuartal I/2022.

Namun, hingga tanggal terakhir pada kuartal I/2022 ini, yakni Kamis (31/2), tidak mengenai peluncuran bursa aset kripto tak kunjung muncul. Sejalan informasi, PT Digital Futures Exchange (DFX) telah terpilih menjadi calon penyelenggara bursa kripto di Indonesia.

Adapun dalam proses pembentukan bursa kripto, pemerintah mengacu pada Peraturan Bappebti No. 8/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka.

Kepala Ritu Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Kementerian Perdagangan Tirta Karno Sejago meminta para investor dan pedagang kripto untuk menunggu proses penyelesaian pembentukan bursa kripto.

"Bingung saja sampai dengan prosesnya selesai," katanya kepada Bisnis, Kamis (31/3).

Dia pun tidak menyebarkan keributan waktu meluncurnya bursa kripto di Tanah Air. Menurutnya, peluncuran bursa kripto akan dilakukan apabila kelengkapan persyaratan seperti infrastruktur penunjang klining berjangka dan kustodi telah dipenuhi.

Di sisi lain, Tirta mengklaim, sejauh ini Bappebti tidak mengalami kendala apapun dalam membentuk bursa kripto.

"Dari kami, sejauh ini tidak ada kendala," lanjutnya. Sebelumnya, dalam sesi rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR pada Kamis (24/3), PT Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana mengatai telah melakukan evaluasi terkait dengan jumlah pedagang dan koin kripto yang diakui. Adapun, sejauh ini di Indonesia, terdapat 17 pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.



Ilustrasi aset kripto Bitcoin, Ether, dan Litecoin.

Menurut Wisnu, kehadiran bursa kripto di Indonesia bisa menambah investasi nilai tukar rupiah.

"Transaksi Rp859 triliun kalau tidak ada exchanger di Indonesia, anak muda mau main di mana? Pasti di luar negeri. Tidak bisa pakai rupiah, harus cari dolar AS. Betapa Rp859 triliun akan menjadi dolar AS, (dan) rupiah akan melemah," tuturnya.

Berdasarkan data Bappebti, transaksi aset kripto mencapai Rp859,4 triliun pada 2021 atau naik 1.222,8% dari torehan 2020 yang masih Rp64,9 triliun.

Adapun selama Januari-Februari 2022, transaksi aset kripto telah mencapai Rp83,8 triliun dengan jumlah pelanggan 12,4 juta investor, meningkat dari 2021 yang sebanyak 11,2 juta.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakindo) & COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Hermanda mengatakan kehadiran bursa akan memberikan kepastian bagi pedagang dan investor aset kripto sekaligus mencegah keraguan masyarakat. Indonesia merupakan salah

satu basis investor kripto paling kuat di dunia. Menurut Laporan Global 2022 Global Overview, Indonesia menempati peringkat ke-7 dengan tingkat kepemilikan kripto sebesar 16,4%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara kepemilikan global sebesar 10,4%.

Penyebabnya adalah karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga memiliki infrastruktur yang mendukung perdagangan aset kripto.

Penyebabnya adalah karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga memiliki infrastruktur yang mendukung perdagangan aset kripto.

Penyebabnya adalah karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga memiliki infrastruktur yang mendukung perdagangan aset kripto.

Penyebabnya adalah karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga memiliki infrastruktur yang mendukung perdagangan aset kripto.

Bi Jada Agung mengkritik bahwa tidak seharusnya aset kripto dijadikan sebagai komoditi di Indonesia, lantaran disinyalir akan berdampak signifikan terhadap sistem keuangan.

Penyatakannya itu disampaikan dalam paparannya dengan Komisi I DPR saat melakukan uji kelayakan sebagai Deputi Gubernur BI. Penatakannya terhadap aset kripto itu, didasarkan pada risiko penertamaan aset kripto yang akan berdampak signifikan terhadap sistem keuangan nasional.

Dengan demikian, menurutnya pengawasan aset kripto yang berada di bawah Bappebti tidak tepat. Untuk itu, dia menyarankan aset kripto sebagai komoditas dapat dikaji ulang dan ditour dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Respons lanjutan mengenai aset kripto pun muncul dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, bahwa pihaknya melarang

**“**Transaksi Rp859 triliun kalau tidak ada exchanger di Indonesia, anak muda mau main di mana? Pasti di luar negeri.**”**

lombok jasa keuangan untuk memfasilitasi perdagangan aset kripto.

"OJK dengan tegas telah melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan, memfasilitasi, memfasilitasi perdagangan aset kripto," ujarnya.

Dalam hal ini OJK menilai aset kripto merupakan jenis komoditas yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun sehingga masyarakat harus paham risikonya. Dia juga meminta masyarakat berhati-hati terhadap potensi skema ponzi di investasi aset kripto. □



Investor memantau pergerakan harga kripto melalui ponselnya di Jakarta.

#### AMBIGU

Kendati langkah Bappebti membentuk bursa kripto dapat disebut sebagai bentuk penertamaan secara konstitusional terhadap aset digital tersebut, nyatanya perbedaan pandangan masih terjadi di kalangan pengambil kebijakan.

Polemik pun muncul takala terdapat perbedaan sikap dan kebijakan antarregulator di Indonesia. Perdebatan itu berawal pada medio November 2021 lalu.

Kala itu, Asisten Gubernur



Karyawan beraktivitas di Mining farm Rekeningku.com di Cibitung, Jawa Barat. Mining Farm yang telah berjalan sejak Oktober 2017 itu kini memiliki lebih dari 2.000 unit GPU dengan kapasitas memambang koin kripto Ethereum (ETH).